

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Politik Keluarga Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024

Pemateri :

1. **Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi)**
2. **R Amalinda Savirani, Dosen Universitas Gajah MADA**
3. **Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute**

Moderator :Nuri Resti Cahyanni, Peneliti Bidang ekonomi

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Ahmad Hidayah, Peneliti Bidang Politik

- Politik keluarga adalah jika terdapat dua orang anggota keluarga atau lebih yang menduduki jabatan politik.
- Politik keluarga dianggap sebagai ketergantungan yang terlalu besar pada ikatan keluarga, yang melahirkan kebiasaan menempatkan keluarga dan ikatan kekerabatan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kewajiban sosial lainnya (Djati, 2013).
- Adapun dampak dari politik keluarga adalah terjadinya pragmatisme partai politik.
- Menciptakan dan menjaga adanya status quo di daerahnya

R. Amalinda Savirani, Dosen Universitas Gajah Mada

- Perjuangan perempuan hingga sekarang dianggap masih rekognisi
- Legislatur perempuan RI di dominasi oleh politik keluarga karena terdapat sumberdaya politik yang dibutuhkan sangat tinggi (kombinasi dari economic capital, social capital, dan symbolic capital dan hal tersebut berakar dari sistem pemilu PR terbuka.
- Ada banyak kader perempuan parpol yang berpotensi tapi tidak mendapat nominasi
- Parpol cenderung memenuhi kuota perempuan tanpa seleksi dan kualifikasi, hal ini mengakibatkan ketika terpilih sumbangan pada kebijakan terkait perempuan terbatas.
- Banyaknya perempuan yang terpilih sebagai hasil politik keluarga adalah bentuk hasil analisis dari supply dan demand demokrasi yang rendah.

- Kebijakan afirmatif untuk kandidat perempuan sudah memadai karena mendorong politik rekognisi politisi perempuan.

Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi)

- Politik keluarga terjadi karena tidak adanya UU yang secara khusus mengatur tentang larangan anggota keluarga untuk menduduki jabatan-jabatan di partai politik.
- Politik keluarga terjadi karena masih tidak adanya kejelasan sistem kaderisasi internal partai yang mengakibatkan makin memburuknya demokrasi di Indonesia
- Sirkulasi kekuasaan tidak akan sehat jika siklus hanya berada di lingkaran yang sama.
- Dengan tidak adanya legal formal yang mengatur tentang pelarangan anggota keluarga untuk menduduki posisi partai politik maka politik keluarga akan semakin banyak dan berkembang yang hal tersebut justru akan memperkaya materiil mereka.

FORUM DISKUSI

Pertanyaan Nuri

1. Bagaimanakah situasi supply dan demand dari kondisi keterwakilan perempuan sebagai bagian politik keluarga saat ini?

Jawaban R Amanda Amalia

1. Supply dan demand yang saya sebutkan sebelumnya merupakan pisau analisis atau alat diagnosis/alat mendeteksi untuk menjelaskan situasi keterwakilan perempuan hari ini, jika ditanya apakah sudah mengalami keseimbangan tentu belum tercapai dan jauh dari harapan.

Jawaban Ahmad Hidayah

1. Supply dan demand yang saya pahami dari apa yang sudah ibu amalinda jelaskan ya, jadi artinya senada yang sudah dijelaskan bang Lucius bahwa kenapa partai politik cenderung pragmatis atau cenderung mengambil kandidat yang sudah memiliki modal sosial capital karena ada tuntutan untuk memenangkan pemilu. Selain itu tadi sudah dijelaskan mengenai sistem proporsional terbuka, burhanuddin muhtadi pernah menjelaskan sistem proporsional menjadikan sistem pemilu kita kandidat sentris. Perlu nama-nama populer untuk menjadikan sebuah partai menjadi dikenal. Kita tidak bisa asal memilih caleg hanya untuk memenuhi kewajiban kita.

Pertanyaan Dewi Rahmawati

1. Apakah UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terdahulu tidak dapat menjadi alat/instrumen hukum yang dapat mengikat para pejabat negara untuk tidak mengembangkan praktik politik keluarga ini?

Jawaban Lucius Karus

1. Adapun Undang-Undang yang disebutkan merupakan UU lama yang banyak disebutkan dalam beragam UU lain. Tidak memberikan secara spesifik bagaimana eksekusi terhadap praktik yang terjadi karena bertabrakan dengan kepentingan lain (konflik kepentingan). Isi Undang-Undang tersebut hanya sering menjadi jargon.

Pertanyaan Adinda Tenriangke Muchtar

1. Apa pendapat anda soal hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dan kaitannya dengan politik keluarga?
2. Apakah Affirmasi bisa efektif jika ada aturan yang memberikan sanksi jika tidak dipenuhi, misalnya sanksi administratif atau sampai tidak boleh ikut pemilu? Beberapa negara juga ada yang menerapkan dan memastikan afirmasi akan representasi perempuan dalam politik

Jawaban R Amalinda

1. Hak yang diatur konstitusi kita kaitkan dengan politik keluarga terutama untuk yang dipilih memang sedikit mengikis karna artinya ada ketidaksamaan kesempatan. Hitung-hitungan politik umumnya tujuannya untuk kemenangan pemilu.

Jawaban Ahmad

1. Orang-orang yang terintegrasi dengan keluarga memiliki hak untuk dipilih berdasarkan keputusan MK. Namun kalau merujuk dengan contoh negara Filipina ternyata indeks korupsinya juga tidak berbeda jauh dari indonesia.

Jawaban Lucius Karus

1. Hak dipilih memang merupakan hak setiap orang yang paling penting adalah kemampuan kita untuk menseleksi calon dan menggunakan hak kita itu dengan benar.

Closing Statement

1. R Amalinda
Kita harus dapat mendeteksi peluang demokrasi yang lebih baik sehingga kita tidak boleh menyerah meskipun belum ada sanksinya.
2. Lucius Karus
Pendidikan politik diberikan guna mencegah praktik politik keluarga.
3. Ahmad Hidayah

Jika akhir-akhir ini Child Free menjadi wacana yang sedang menggema, hal itu bukanlah solusi untuk politik keluarga, kita tidak bisa memaksakan mereka untuk menempatkan anak keturunannya untuk berada duduk di pengkaderan politik. Kita harus menempatkan mereka sebagai get keeper atau penjaga demokrasi.

Catatan :

- 1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
- 2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

~ TERIMA KASIH ~